

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem Perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem Perpajakan Nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan Pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga melengkapi. antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah.(infopajak.com).

Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Dalam melakukan pembangunan suatu Daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan Daerah yang paling besar untuk membangun Daerah sendiri yaitu berasal dari Rumah Makan dan Restoran.

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat layanan maupun ditempat lain.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Restoran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran Di Kabupaten Kepulauan Anambas Bagaimana sebenarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA Kabupaten Kepulauan Anambas), dimana pihak Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas harus

melakukan kegiatan-kegiatan yang khas dan khusus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun rencana pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Restoran/Rumah Makan adalah:

1. Mendata semua Restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Diadakannya penyuluhan terhadap pemilik Restoran/Rumah Makan untuk membayar Pajak.
3. Memberitahukan pentingnya membayar Pajak khususnya sektor Pajak Restoran/Rumah Makan.
4. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar Pajak.
5. Memberitahukan tata cara pembayaran Pajak Restoran/Rumah Makan.

1.2 Jenis Pajak yang dipungut di Kabupaten Kepulauan Anambas

Adapun jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Kepulauan Anambas dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL. 1

Realisasi Pajak Daerah Terhadap

Pajak Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2012

No	JENIS PAJAK	TERGET	REALISASI	PRESENTASE
1	Pajak Hotel	352.793.000,00	520.937.811,20	147,66%
2	Pajak Restoran	1.773.165.400,00	1.857.083.734,94	104,73%
3	Pajak Hiburan	2.000.000,00	5.921.500,00	296,07%
4	Pajak Reklame	90.000.000,00	685.000,00	0,76%
5	Pajak Penerangan Jalan	2.080.000.000,00	4.299.201.547,00	206,69%
6	Pajak Air Bawah Tanah	70.000.000,00	47.846.940,00	68,35%
7	BPHTB	90.000.000,00	48.720.894,00	54,13%

(sumber : Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas)

Berdasarkan data Tabel I.2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dipengaruhi oleh sektor pajak, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas, selama dua tahun (2011-2012), PAD Kabupaten Kepulauan Anambas disumbangkan dari sektor lain-lain PAD sebanyak Rp. 352.793.000.00, Sektor Pajak Hotel, Sebanyak Rp. 1.773.165.400,00, sektor pajak Restoran, sebanyak Rp. 2.000.000,00, sektor pajak Hiburan, sebanyak Rp. 90.000.000,00, sektor pajak Reklame, sebanyak Rp. 2.080.000.000,00, sektor pajak Penerangan Jalan, sebanyak Rp. 70.000.000,00, sektor pajak Air Bawah Tanah, sebanyak Rp. 90.000.000,00, sektor BPHTB.

Dari pembayaran disektor pajak Restoran/Rumah makan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menargetkan penerimaan pajak 1.773.165.400,00, namun yang baru terealisasi 1.857.083.734.94, jadi presentase penerimaan pajak Restoran/Rumah Makan 104.73%.

1.3. Kontribusi Pajak Restoran/Rumah Makan Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Restoran/Rumah makan memberikan peranan yang cukup berarti bagi sector PAD maupun sektor Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini tergambar dalam kontribusi Pajak Restoran/Rumah makan terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2.3Tingkat Kepatuhan Pajak Restoran di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kepulauan Anambas

Pajak Restoran merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran memberikan sumbangan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana Pajak Restoran dipergunakan untuk mendukung dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut ini tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas anggaran 2010 -2012 :

Tabel .2

**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2010-2012 (Dalam Rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2010	99.562.060,00	61.108.413,00	61,38
2	2011	156.100.806,00	1.927.839.010,20	1.235,00
3	2012	1.773.165.400,00	1.857.083.734,00	104,73

(Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas)

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak Restoran/Rumah Makan pada tahun 2010 mencapai 61,38% dan pada tahun 2011 perkembangan realisasi pemungutan pajak Restoran/Rumah Makan sangat bagus hingga mencapai 1.235,00% dimana tahun 2012 pemungutan pajak menurun hingga 104,73% Realisasi dari penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Kepulauan Anambas terjadinya Pendapatan yang turun naik atau berfluktuasi setiap tahunnya.

Meningkatnya jumlah Pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2011 disebabkan oleh bertambah banyaknya objek-objek Pajak Restoran, antara lain :

a.Restoran/ Rumah Makan baru

b. Beberapa Cafetaria baru dll

Dan menurunnya jumlah pendapatan Restoran pada tahun 2012 disebabkan oleh banyaknya pengusaha restoran yang tidak langsung membayar

pajak terutangnya namun menunggu hingga sampai batas akhir dari waktu pembayaran pajak terutang.

Dari data di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran dari Tahun anggaran 2010-2011 mengalami peningkatan dari 61,38% menjadi 1.235,00% Dan pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan dari 1.235,00% menjadi 104,73%.

Penyebab belum tercapainya target penerimaan Pajak Restoran Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pemungutan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, kedua sistem tersebut memiliki kelemahan, yaitu :

1. Sistem Official Assesment menyebabkan :
 - a. Wajib Pajak Menunggak pembayaran, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak merasa tidak perlu menghitung pajak terutangnya dan menunggu perintah pembayaran pajak dari DISPENDA setempat hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak.
 - b. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD, hal ini disebabkan penghitungan pajak dilakukan oleh DISPENDA sehingga belum tentu sama dengan jumlah penghasilan sebenarnya.
2. Sistem Self Assesment menyebabkan :
 - a. Masih terdapatnya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPTPD, hal ini disebabkan Wajib Pajak berusaha menghindari utang pajaknya
 - b. Masih terdapatnya Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak, karena Wajib pajak menunggu tanggal jatuh tempo pajak terutangnya

- c. Wajib Pajak berusaha mengurangi beban pajaknya dengan mengurangi jumlah penghasilannya

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta melihat langsung bagaimana Undang-undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Maka penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu: “ **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Restoran Di Kabupaten Kepulauan Anambas**”.

I.2 Perumusan masalah

Dari uraian diatas melihat permasalahan yang ada pada DISPENDA Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:“ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Restoran Di Kabupaten Kepulauan Anambas”

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pembayaran Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas.

I.3.2 Manfaat Penelitian

1. Dapat mempraktikkan teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah kedalam Dunia kerja.
2. Dapat melaksanakan observasi tentang pengelolaan Pajak Restoran.
3. Mengetahui dan memahami cara Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Restoran.
4. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa menyangkut sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas

I.4 Metode Penelitian

I.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan oleh penulis yaitu kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di JL. Imam Bonjol No 15 Telp/fex (0772) 31433 email :dispenda_anambas@yahoo.co.id. TAREMPA.

I.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret dan akan direncanakan selesai pada bulan Juni 2013.

I.4.3 Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode cara yaitu:

- a. Data Primer : data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat Objek Penelitian.
- b. Data Sekunder : data / informasi yang diperoleh melalui studi *literature* seperti sumber-sumber pustaka, Undang-undang, dokumentasi maupun *literature* lain yang berhubungan dengan objek Penelitian.

I.4.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data digunakan 2 metode, yaitu :

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu kegiatan pengumpulan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan menambah objektif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pengamatan (Observasi)

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak kepada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko yang tinggi.

I.4.5 Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara Kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, , metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas, sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Anambas, uraian tugas pokok dan fungsinya.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang Tinjauan Pajak Restoran/Rumah Makan Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

